

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Profil Desa Tenggur**

Tenggur merupakan salah satu desa di Kecamatan Rejotangan. Desa ini mempunyai wilayah seluas 262,85 Ha. Jumlah penduduk sebanyak 4.767 jiwa, terdiri dari 2.318 penduduk laki-laki dan 2.449 penduduk perempuan. Dengan total Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.571.

Mata pencaharian utama penduduk adalah sebagai petani. Dengan luas sawah sebesar 153 Ha dan ladang 107 Ha. Sedangkan untuk produk unggulan perkebunan berupa buah mangga.

Terdapat fasilitas pendidikan cukup memadai dari mulai tingkat Play Group sampai SD, juga terdapat sekolah islam. Terdapat juga fasilitas kesehatan berupa puskesmas. Secara administratif, desa Tenggur terbagi menjadi 8 Rukun Warga dan 20 Rukun Tetangga.

Lembaga-lembaga desa yang telah aktif adalah LKD, LPMD, Tim Penggerak PKK, BUMDES, Kelompok Tani dan organisasi perempuan lainnya.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> [Tenggur.tulungagungdaring.id/profil](http://Tenggur.tulungagungdaring.id/profil), diakses pada tanggal 11 April 2019

### **a. Sejarah Desa Tenggur**

Menurut sesepuh Desa Tenggur, bahwasannya keberadaan Desa Tenggur didirikan oleh seseorang yang berasal dari Mataram yang bernama Sentono Panjang dengan anak buahnya, berdirinya desa tidak tercatat tanggal, bulan maupun tahun. Selain itu, keberadaan Desa Tenggur juga merupakan bagian dari kesejarahan Kabupaten Tulungagung.

Pada suatu hari dalam pelaksanaan pembabatan hutan, Sentono Panjang dikerumuni sejenis hewan tenggu, sehingga mereka tidak dapat bekerja dan menganggur, lama kelamaan desa yang dibabat tadi belum sempurna dinamakan Desa Tenggur, yang berasal dari tenggu dan mengaggur dan sampai sekarang dinamakan Desa Tenggur.

### **b. Visi dan Misi Desa Tenggur**

Visi Desa Tenggur yaitu mewujudkan Desa Tenggur yang makmur sejahtera perekonomiannya, guyup rukun sosial masyarakatnya, dan religius mengabdikan kepada Tuhan.

Misi Desa Tenggur yaitu a) Membangun infrastruktur desa melalui APDES yang transparan demi kesejahteraan warga, b) Meningkatkan peran lembaga desa dan pemuda sebagai penggerak pembangunan desa dan c) Meningkatkan fasilitas pendidikan dasar umum dan keagamaan yang bermutu dan terjangkau untuk warga.

## **2. Profil Desa Buntaran**

Buntaran adalah salah satu desa di Kecamatan Rejotangan. Desa ini memiliki wilayah 214.180 hektar. Jumlah penduduknya sebanyak 4.384 jiwa, terdiri dari 2.205 laki-laki dan 2.179 perempuan. Jumlah kepala keluarga 1.431 jiwa.

Sebagian besar lahan dipakai untuk usaha pertanian, tegal, pemukiman, dan pekarangan. Usaha sawah didominasi oleh tanaman pangan padi, sedangkan usaha hortikultura menghasilkan komoditas tebu dan buah rambutan sebagai buah musiman. Usaha ekonomi unggulan masyarakat lainnya adalah peternak sapi dan ayam.

Terdapat fasilitas pendidikan yang cukup representatif, terbukti dengan keberadaan sarana pendidikan dari jenjang play group, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP dan SMA. Terdapat juga fasilitas kesehatan berupa puskesmas, layanan posyandu, bidan, perawat, dan dokter praktek. Secara administratif, Desa Buntaran terbagi menjadi 5 Rukun Warga, 23 Rukun Tetangga. Lembaga-lembaga desa yang telah aktif lainnya adalah LPMD, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, dan BUMDES.<sup>99</sup>

### **a. Sejarah Desa Buntaran**

Dulu ketika babat alas dimulai dari sukoharjo ke utara, dan wilayah Buntaran akan dijadikan tempat babat terakhir, disebut dengan istilah Buntaran. Sebelum membabat alas Buntaran di selatan wilayah ini ada

---

<sup>99</sup> Buntaran.tulungagungdaring.id/profil, diakses pada tanggal 1 April 2019

alas yang banya binatang tengunya., binatang kecil yang banyak mengigit orang. Sehingga wilayah tersebut di “gur-ne” atau ditinggalkan. Kemudian wilayah tersebut dinamakan Desa Tenggur. Sedangkan wilayah di utara tenggur ini dikenal sebagai babad terakhir,buntar. Dikemudian hari wilayah buntarabn ini dikenal dengan sebutan Desa Buntaran.

#### **b. Visi dan Misi Desa Buntaran**

Visi Desa Buntaran adalah Terciptanya kehidupan masyarakat Desa Buntaran yang guyub rukun ayem tentrem lan tinoto, religius dalam membangun desa melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan.

Misi Desa Buntara yaitu a) Mendorong kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa , b) mengembangkan dan membangun sistem pemerintahan desa yang propesional, efektif dan efisien. Serta membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik, c) memperkuat dan mengembngkan sumber-sumber ekonomi rakyat dengan kelembagaan ekonomi masyarakat sebagai potensi unggulan di semua bidang, d) menanggulangi kemiskianan dengan peningkatan ketrampilan dan pengembangan pertanian, industri kecil dan perdagangan setta peningkatan peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan, e) mengembangkan solidaritas atar tokoh masyarakat dan semua komponen msyarakat untuk membangun desa yang berlandaskan moral serta menjunjung tinggi nilai-

nilai agama dan adat istiadat. Serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam mewujudkan cita-cita pembanguna desa melalui organisasi keagamaan dan karang taruna, f) terciptanya harmonisasi dan penyelarasan program-program desa dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, g) mendorong terlaksananya restrukturisasi perangkat guna meningkatkan pelayanan masyarakat dan mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

### **3. Paparan Data**

Penelitian tesis yang berjudul “Peran Pogram Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) bagi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Dalam Prespektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Tenggur dan Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung”, penelitian ini dimulai tanggal 24 Maret sampai 28 Mei 2019.

Dalam penelitian ini, narasumber utama adalah Kepala Desa Tenggur dan Desa Buntaran , Pendamping Kecamatan, Pendamping Desa, dan Kepala rumah tangga perempuan yang mendapat bantuan program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan di Desa Tenggur dan Desa Buntaran, Kepala Desa Tenggur dan Desa Buntaran,.

Lokasi penelitian ini berada di Desa Tenggur dan Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

**a. Peran Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Perempuan**

- Pemberdayaan Perempuan di Desa Tenggur

Dalam hal ini pemberdayaan perempuan merupakan salah satu terobosan yang akan mempercepat transformasi kegiatan sosial non-ekonomi menjadi suatu usaha ekonomi. Pada prinsipnya pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mendinamisasikan faktor-faktor penting yang ada pada keluarga yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan keluarga yang dimulai dari aspek mengenali masalah, kebutuhan, aspirasi dan menghargai potensi yang dimiliki serta mempercayai tujuan yang ingin di capai.<sup>100</sup>

Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) merupakan salah satu program Jalin Matra (jalan lain menuju mandiri dan sejahtera) yang digagas oleh pemerintah Jawa Timur tahun 2015-2018 untuk memberdayakan perekonomian masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi dimana sasaran program ini adalah rumah tangga dengan status kesejahteraan 10% terendah (desil 1) berdasarkan PPLS 2011 yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K, rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan yang memiliki anggota rumah tangga produktif dengan usia antara 15-65 tahun.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Mardiyatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta:Adiyana Press, 2000), hal 1-2

<sup>101</sup> Pemprov Jatim, *Pedum Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan 2018*, hal 16

Berdasarkan wawancara peneliti terkait program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) melalui pemberdayaan perempuan di Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Berikut penjelasan Bapak Ahmad Samsul selaku Kepala Desa di desa Tenggur :

Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi merupakan program yang di desain khusus oleh gubernur jawa timur untuk membantu kepala rumah tangga perempuan.<sup>102</sup>

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Gubernur Jawa Timur menggalakkan program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan lebih didominasi oleh perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Faktor yang menyebabkan rumah tangga menjadi miskin diantaranya adalah kasus perceraian yang menyebabkan perempuan mengambil alih tugas laki-laki sebagai kepala rumah tangga dimana perempuan jauh lebih rentan miskin daripada laki-laki dikarenakan perempuan harus memikul sendiri beban ekonomi dan rumah tangga secara bersamaan, salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah ketika suami selaku kepala keluarga bekerja sebagai TKI atau sebaliknya, dan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten penyumbang TKI yang cukup besar di Jawa Timur.

Berbicara tentang Jalin Matra penanggulangan feminisasi kemiskinan, dalam pelaksanaannya pemerintah mempunyai tahapan-tahapan untuk kegiatan tersebut, berikut hasil wawancara peneliti

---

<sup>102</sup> Kepala Desa Tenggur, Bapak Ahmad Samsul, Wawancara (Tenggur, 25 Maret 2019)

tentang tahapan pelaksanaan program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan.

Langkah pertama yang kita lakukan yaitu sosialisasi, tahap pra rembug warga, rembug warga, klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan, rapat pengelola desa, Pengajuan Pencairan dana, rembug pokmas persiapan realisasi bantuan, Pengadaan barang, penyerahan bantuan, bimbingan teknis, rembug warga pertanggungjawaban dan rekomendasi usulan.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan pada tahap awal ini cukup panjang, kegiatan yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu sosialisasi, pra rembug warga, rembug warga, klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan, rapat pengelola desa, Pengajuan Pencairan dana, rembug pokmas persiapan realisasi bantuan, Pengadaan barang, penyerahan bantuan, bimbingan teknis, rembug warga pertanggungjawaban dan rekomendasi usulan. Dimana untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan feminisasi kemiskinan tahapan kegiatan tersebut tidak bisa ditinggalkan.

Dalam program ini pendamping kabupaten terlebih dahulu harus mensosialisasikan program kepala desa yang bersangkutan, berikut hasil wawancara terkait tugas dan peran pendamping kabupaten:

Saya disini ikut sosialisasi di tingkat kabupaten, rapat bersama kepala desa, sosialisasi ke desa, dan juga musyawarah desa.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Kepala Desa Tengkur, Bapak Ahmad Samsul, Wawancara (Rejotangan, 25 Maret 2019)

<sup>104</sup> Pendamping Kabupaten, Bapak Didik Priyono, Wawancara (Rejotangan, 15 April 2019)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program jalin matra penanggulangan feminisasi.

Kegiatan pra rembug dan rembug warga yang dilaksanakan tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab kepala desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan di tingkat paling bawah, berikut hasil wawancara yang menunjukkan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan persiapan tersebut.

Saya sebagai kepala desa sebelumnya mendata janda-janda yang ada di tenggur ini yang masih produktif, yang jelas kita survey sungguh-sungguh.<sup>105</sup>

Hal tersebut selaras dengan pernyataan KRTP sasaran sebagai berikut:

Sebelum menerima program bantuan itu saya disurvey mbak, ada bu Nur (selaku pendamping desa).<sup>106</sup>

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pra rembug warga dan rembug warga merupakan salah satu forum pendekatan yang dilakukan kepada kepala rumah tangga perempuan sasaran, dimana dalam kegiatan pra rembug dan rembug warga tersebut pendamping kecamatan hingga desa berkumpul dan duduk bersama dengan kepala rumah tangga perempuan sasaran.

Tahap selanjutnya yaitu klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan kepala rumah tangga perempuan, dimana kita harus berdialog dan berinteraksi langsung dengan kepala rumah tangga

---

<sup>105</sup> Kepala Desa Tenggur, Bapak Ahmad Samsul, Wawancara (Rejotangan, 25 Maret 2019)

<sup>106</sup> KRTP Desa Tenggur, Ibu Siti Rokhimawati, Wawancara (Rejotangan, 27 Maret 2019)

perempuan sasaran. Berikut hasil wawancara peneliti terkait hal tersebut.

Kita melihat kondisi rill dari kepala rumah tangga perempuan, serta terisinya form klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan kepala rumah tangga perempuan.<sup>107</sup>

Dengan pemaparan diatas, Ibu Eka juga memaparkan bahwa:

Kita langsung turun ke lapangan dengan menggunakan metode observasi langsung.<sup>108</sup>

Pemaparan tersebut selaras dengan pernyataan pendamping desa, sebagai berikut :

Kita langsung berdialog dan menjaring aspirasi mengenai jenis usulan kebutan rumah tangga perempuan sesuai dengan potensinya.<sup>109</sup>

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan kepala rumah tangga perempuan dilakukan dengan mengecek kondisi rill kepala rumah tangga perempuan serta mendalami jenis kebutuhan kepala rumah tangga perempuan yang berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup sesuai karakteristik soaial ekonomi, dan wilayah geografis rumah tangga sasaran.

Kegiatan selanjutnya yaitu rapat pengelolaan desa yang didampingi langsung oleh pendamping desa, pembentukan kelompok masyarakat ini didasarkan atas kesamaan variasi usaha yang akan

---

<sup>107</sup> Kepala Desa Tenggur, Bapak Ahmad Samsul, Wawancara (Rejotangan, 25 Maret 2019)

<sup>108</sup> Pendamping Desa Tenggur, Ibu Eka, Wawancara (Rejotangan, 26 Maret 2019)

<sup>109</sup> Pendamping Desa Tenggur, Ibu Nur, Wawancara (Rejotangan, 26 Maret 2019)

dilaksanakan oleh kepala rumah tangga perempuan atau berdasarkan kedekatan lokasi penerima.

Kami selaku pendamping desa memaparkan hasil klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan, penetapan calon KRTP, penetapan anggota pokmas, dan pembahasan penyusunan draft dokumen pencairan BKK desa.<sup>110</sup>

Hal ini selaras dengan data observasi yang ditemukan peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa pembentukan pokmas memang didasarkan atas kedekatan lokasi kepala rumah tangga perempuan satu dengan kepala rumah tangga perempuan lainnya, hal ini bertujuan memudahkan pendamping desa untuk memantau keberlangsungan usaha yang dijalankan kepala rumah tangga perempuan tersebut.

Tahap selanjutnya yaitu pengajuan pencairan dana dimana pendamping desa mendampingi KRTP sasaran menuangkan ide atau gagasannya:

Kami selaku pendamping desa menyusun dokumen pencairan BKK desa, verifikasi dokumen pencairan dana BKK desa dan pengajuan dokumen pencairan BKK desa.<sup>111</sup>

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penyusunan dokumen pencairan BKK desa, verifikasi dokumen pencairan dana BKK desa dan pengajuan dokumen pencairan BKK desa sepenuhnya dilaksanakan oleh pendamping desa. Namun, ide yang diangkat sepenuhnya dari KRTP sasaran, pembuatan dokumen ini sepenuhnya dikerjakan oleh pendamping desa dikarenakan tidak

---

<sup>110</sup> Pendamping Desa Tengkur, Ibu Eka, Wawancara (Rejotangan, 26 Maret 2019)

<sup>111</sup> Pendamping Desa Tengkur, Ibu Nur, Wawancara (Rejotangan, 26 Maret 2019)

memungkinkannya pembuatan proposal ini jika dilaksanakan oleh KRTP sasaran.

Selanjutnya yaitu Rembug Pokmas persiapan realisasi bantuan, dimana pendamping desa, sekretariat desa dan kepala rumah tangga perempuan terlibat didalamnya. Berikut wawancara dengan pendamping desa :

Kami melakukan pendalaman review usulan kebutuhan, update perkembangan kondisi KRTP dan menyepakati rencana tindak lanjut.<sup>112</sup>

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa review terhadap rincian usulan kebutuhan kepala rumah tangga perempuan meliputi jenis, dan spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh kepala rumah tangga perempuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran.

Setelah dibentuk kelompok-kelompok dengan diketuai salah satu kepala rumah tangga perempuan sasaran program dan didampingi langsung oleh satu pendamping desa, dilakukan pendalaman kebutuhan kepala rumah tangga dimana pendalaman kebutuhan ini disesuaikan dengan keinginan, berikut ini wawancara proses pengadaan barang kepala rumah tangga perempuan :

Kami pengadaan jenis barang usulan kepala rumah tangga sesuai hasil identifikasi kebutuhan kepala rumah tangga perempuan.<sup>113</sup>

Dengan pemaparan diatas, Ibu Eka juga memaparkan bahwa:

---

<sup>112</sup> Pendamping Desa Tenggur, Ibu Eka, Wawancara (Rejotangan, 26 Maret 2019)

<sup>113</sup> Pendamping Desa Tenggur, Ibu Nur, Wawancara (Rejotangan, 26 Maret 2019)

Kami disini selaku pendamping desa mengadakan barang untuk kebutuhan kepala rumah tangga perempuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.<sup>114</sup>

Hal tersebut selaras dengan pernyataan kepala rumah tangga sasaran sebagai berikut :

“Saya dulu minta dibelikan tabung gas elpiji untuk tambahan jualan saya.”<sup>115</sup>

Hasil wawancara tersebut selaras dengan data observasi yang ditemukan peneliti dilapang yang menunjukkan bahwa pengadaan barang kepala rumah tangga perempuan sesuai dengan apa yang sudah di usulkan di form rincian kebutuhan kepala rumah tangga perempuan. Pengadaan barang untuk kebutuhan kepala rumah tangga perempuan dilakukan dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektif, dan transparan,.

Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan dimana tahap pelaksanaan bisa dilaksanakan setelah bantuan dari pemerintah provinsi telah dicairkan kepada kepala rumah tangga perempuan. Pelaksanaan pencairan bantuan yang dilaksanakan oleh masing-masing desa berbeda. Berikut wawancara peneliti dengan nara sumber yang berkaitan dengan hal tersebut:

Pencairannya dilaksanakan dalam satu tahap akan tetapi waktunya bergantian tergantung data yang sudah masuk ke provinsi. Sehingga tiap-tiap desa yang memperoleh bantuan pencairannya tidak serentak, bantuan dalam bentuk barang

---

<sup>114</sup> Pendamping Desa Tenggur, Ibu Eka, Wawancara (Rejotangan, 26 Maret 2019)

<sup>115</sup> KRTP Desa Tenggur, Ibu Saniyem, Wawancara (Rejotangan, 27 Maret 2019)

kepada kepala rumah tangga senilai Rp 2.500.000 per kepala rumah tangga perempuan.<sup>116</sup>

Hasil wawancara diatas pencairan bantuan Jalin Matra PFK ini dalam satu termin, penyaluran bantuan ini tidak dibebankan biaya administrasi apapun kepada KRTP sasaran, jadi bantuan dari pemprov senilai 2.500.000 sepenuhnya diterima kepada KRTP sasaran yang didalamnya terdapat prosentase-prosentase pembagian yang ditentukan oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk kebutuhan modal usaha dan kebutuhan pokok.

Dalam realisasinya pembagian prosentase tersebut berbeda kebijakannya di setiap desa, hal tersebut tercermin dalam wawancara dibawah ini.

Dari bantuan sebesar 2.250.000 itu sepenuhnya untuk modal, pokoknya yang boleh dipergunakan untuk sembako hanya 250.000 saja.<sup>117</sup>

Setelah bantuan tersebut diterima kepada KRTP sasaran, dalam tahap pelaksanaannya KRTP akan mengimplementasikan ide atau gagasannya kedalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang perekonomian keluarganya, berikut hasil wawancara peneliti tentang pengimplementasian bantuan setelah dicairkan kepada KRTP.

Tahun 2018 kita kan bantuannya berupa uang, jadi yang belanja nantinya pendamping desa sesuai dengan yang diminta KRTP, nota kwitansi nantinya dikumpulkan menjadi satu dan kita simpan di desa untuk dijadikan bukti peng LPJan kita.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Kepala Desa Tenggur, Bapak Ahmad Samsul, Wawancara (Rejotangan, 25 Maret 2019)

<sup>117</sup> Pendamping Desa Tenggur, Ibu Nur, Wawancara (Rejotangan, 26 Maret 2019)

<sup>118</sup> Kepala Desa Tenggur, Bapak Ahmad Samsul, Wawancara (Rejotangan, 25 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa KRTP mempunyai peran penting terhadap pengimplementasian rencana usaha yang telah disepakati sebelumnya karena pembelanjaan untuk mendukung usaha yang akan dilaksanakan dilakukan oleh pendamping desa, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang menunjang peningkatan kapasitas KRTP untuk mengembangkan kapasitas diri dalam pengembangan usaha yang akan dijalankannya, pembelanjaan ini harus dilakukan bersama dengan pendamping desa untuk mempermudah pengawasan alokasi anggaran yang diberikan dipergunakan secara tepat atau tidak.

Tahap selanjutnya yaitu evaluasi, tahap ini merupakan salah satu proses pengawasan yang dilakukan pendamping bersama dengan masyarakat terhadap program yang telah dilaksanakan, berikut wawancara peneliti terkait tahap ini dalam kegiatan evaluasi penanggulangan feminisasi kemiskinan yang telah dilaksanakan.

Mulai dari pencairan sampai selesai program kita harus monitoring ke RTS masing-masing, dari monitoringpun tidak mungkin kita monitoring semuanya, kita sampling saja misalkan 50% dari 24 KRTP nanti kita hanya kunjungan ke 12.<sup>119</sup>

Hal tersebut selaras dengan pernyataan hasil wawancara berikut:

Waktu itu ada peninjauan atau monitoring dari provinsi, langsung ke KRTP sasaran, di Desa Tenggur kan ada 2 kelompok, dua kelompok itu dimintai tiga KRTP, jadi acak namanya.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Kepala Desa Tenggur, Bapak Ahmad Samsul, Wawancara (Rejotangan, 25 Maret 2019)

<sup>120</sup> Pendamping Desa Tenggur, Ibu Eka, Wawancara (Rejotangan, 26 Maret 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa monitoring yang dilaksanakan oleh pendamping pemprov dilakukan secara acak atau sampling, dalam kegiatan monitoring tersebut dirasa belum maksimal atau kurangnya waktu perpanjangan waktu monitoring yang dilakukan untuk mendukung keberlanjutan program, paparan tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut:

lemahnya dari program ini itu tidak ada pendampingan secara intens ditingkat penerima, kami hanya bisa mengontro,<sup>121</sup>

Tahap terakhir dalam pemberdayaan yaitu terminasi atau pemutusan hubungan secara formal antara pemberi dan penerima dana, berikut wawancara peneliti terkait terminasi yang dilakukan dalam program ini.

Kita sebagai pendamping menggagas yang namanya berjejaring, kita buat wadah, beberapa usaha kita wadai di mothercare jatim atau di jarik lurik kita posting-posting produk mereka kita bantu asalkan produk-produk mereka yang kita nilai cukup layak untuk dipasarkan,<sup>122</sup>

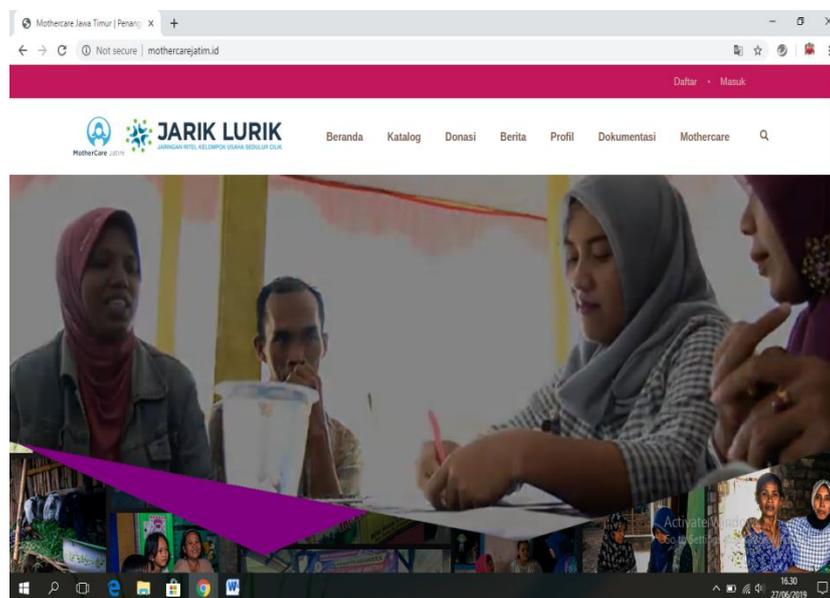
Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa pendamping ditingkat kabupaten telah menggagas pengadaan web khusus untuk keberlanjutan kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan yang diisi dengan konten-konten seputar KRTP seperti profil-profil usaha Kepala Rumah Tangga Perempuan beserta hasil-hasil usaha Kepala Rumah Tangga Perempuan yang layak untuk dipasarkan, usaha-usaha populer yang dijalankan oleh KRTP sasaran, fasilitas tanya jawab

---

<sup>121</sup> Perwakilan Perangkat Desa Tengkur, Bapak Imam Mukti, Wawancara (Rejotangan, 25 Maret 2019)

<sup>122</sup> Pendamping Kabupaten, Bapak Didik Priyono, Wawancara (Rejotangan, 15 April 2019)

dengan dengan pakar seputar pemberdayaan KRTP, dan lain-lain. Harapan pengadaan web ini adalah membantu memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam pemasarannya, hal lain yang diangkat dari jejaring yang dibangun oleh pendamping tingkat kabupaten adalah tidak mengenyampingkan fungsi sosialnya, salah satu contohnya adalah membukakan akses-akses kepada lembaga sosial yang ada yang kemungkinan akses tersebut bisa membantu masyarakat dalam hal lainnya seperti pendidikan. Berikut gambar web yang digagas oleh pendamping tingkat kabupaten untuk Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan.<sup>123</sup>



Gambar 4.1 Web Jarik Lurik Mothercare Jatim Sumber: <http://mothercarejatim.id/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019

<sup>123</sup> <http://mothercarejatim.id/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2019

Pernyataan tersebut selaras dengan data observasi yang ditemukan peneliti di lapang yang menunjukkan kesesuaian antara isi web yang diunggah dengan keadaan di lapang, yang artinya profil-profil KRTP yang diunggah di web tersebut benar-benar profil-profil KRTP yang usahanya masih berjalan dan berpotensi untuk berkembang.

- Pemberdayaan Perempuan di Desa Buntaran

Berdasarkan wawancara peneliti terkait program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) melalui pemberdayaan perempuan di Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Berikut penjelasan Bapak Fauz Abadi selaku Kepala Desa di Desa Buntaran :

Program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan merupakan program dari Gubernur Jawa Timur untuk membantu janda yang produktif.<sup>124</sup>

Hasil wawancara diatas dapat diketahui program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan merupakan program untuk membantu janda yang produktif sehingga dapat dikelola secara mandiri oleh rumah tangga sasaran dalam rangka untuk mensejahterakan keluarganya.

Program Jalin Matra penanggulangan feminisasi kemiskinan, dalam pelaksanaannya pemerintah mempunyai tahapan-tahapan untuk kegiatan tersebut, berikut hasil wawancara peneliti tentang tahapan

---

<sup>124</sup> Kepala Desa Buntaran, Bapak Fauz Abadi, Wawancara (Rejotangan, 25 April 2019)

pelaksanaan program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan.

Pertama-tama tahap sosialisasi, pra rembug warga, rembug warga, klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan, rapat pengelola desa, Pengajuan Pencairan dana, rembug pokmas persiapan realisasi bantuan, Pengadaan barang, penyerahan bantuan, bimbingan teknis, rembug warga pertanggungjawaban dan rekomendasi usulan.<sup>125</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan diantaranya yaitu sosialisasi, pra rembug warga, rembug warga, klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan, rapat pengelola desa, Pengajuan Pencairan dana, rembug pokmas persiapan realisasi bantuan, Pengadaan barang, penyerahan bantuan, bimbingan teknis, rembug warga pertanggungjawaban dan rekomendasi usulan. Dimana untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan feminisasi kemiskinan tahapan kegiatan tersebut tidak bisa ditinggalkan.

Dalam hal ini pendamping kabupaten terlebih dahulu harus mensosialisasikan program kepala desa yang bersangkutan, berikut hasil wawancara terkait tugas dan peran pendamping kabupaten:

Kegiatan sosialisasi terdiri atas penjelasan umum tentang program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan, penjelasan tentang pedoman umum dan petunjuk teknis operasional.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Kepala Desa Buntaran, Bapak Fauz Abadi, Wawancara (Rejotangan, 25 April 2019)

<sup>126</sup> Pendamping Kabupaten, Bapak Didik Priyono, Wawancara (Rejotangan, 15 April 2019)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program jalin matra penanggulangan feminisasi.

Kegiatan pra rebug dan rebug warga yang dilaksanakan tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab kepala desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan di tingkat paling bawah, berikut hasil wawancara yang menunjukkan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan persiapan tersebut.

Saya sebagai kepala desa sebelumnya membentuk dan menetapkan sekretariat desa dan pendamping desa.<sup>127</sup>

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pra rebug dan rebug warga merupakan media sosialisasi penanggulangan feminisasi kemiskinan ditingkat desa.

Tahap selanjutnya yaitu klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan kepala rumah tangga perempuan, dimana kita harus berdialog dan berinteraksi langsung dengan kepala rumah tangga perempuan sasaran. Berikut hasil wawancara peneliti terkait hal tersebut.

Kita terjun langsung ke lapangan untuk mendata usulan kebutuhan usaha dari setiap kepala rumah tangga perempuan.<sup>128</sup>

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan kepala rumah tangga perempuan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendata jenis kebutuhan kepala rumah tangga perempuan yang berpotensi untuk

---

<sup>127</sup> Kepala Desa Buntaran, Bapak Fauz Abadi, Wawancara (Rejotangan, 25 April 2019)

<sup>128</sup> Kepala Desa Buntaran, Bapak Fauz Abadi, Wawancara (Rejotangan, 25 April 2019)

dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup sesuai karakteristik sosial ekonomi, dan wilayah geografis rumah tangga sasaran.

Kegiatan selanjutnya yaitu rapat pengelolaan desa yang didampingi langsung oleh pendamping desa, pembentukan kelompok masyarakat ini didasarkan atas kesamaan variasi usaha yang akan dilaksanakan oleh kepala rumah tangga perempuan atau berdasarkan kedekatan lokasi penerima.

Saya selaku pendamping desa memaparkan hasil klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan, penetapan calon KRTP, dan penetapan anggota pokmas.<sup>129</sup>

Hal ini selaras dengan data observasi yang ditemukan peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa pembentukan pokmas memang didasarkan atas kedekatan lokasi kepala rumah tangga perempuan satu dengan kepala rumah tangga perempuan lainnya.

Tahap selanjutnya yaitu pengajuan pencairan dana dimana pendamping desa mendampingi KRTP sasaran menuangkan ide atau gagasannya. Berikut wawancara dengan pendamping desa :

Saya selaku pendamping desa menyusun proposal dan dokumen pencairan.<sup>130</sup>

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penyusunan proposal dan dokumen pencairan sepenuhnya dilaksanakan oleh pendamping desa.

Selanjutnya yaitu Rembug Pokmas persiapan realisasi bantuan, dimana pendamping desa, sekretariat desa dan kepala rumah tangga

---

<sup>129</sup> Pendamping Desa Buntaran, Ibu Rifki, Wawancara (Rejotangan, 26 April 2019)

<sup>130</sup> Pendamping Desa Buntaran, Ibu Rifki, Wawancara (Rejotangan, 26 April 2019)

perempuan terlibat didalamnya. Berikut wawancara dengan pendamping desa :

Saya melakukan pendalaman review usulan kebutuhan, melihat perkembangan kondisi kepala rumah tangga perempuan dan melakukan rencana tindak lanjut.<sup>131</sup>

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa review terhadap rincian usulan kebutuhan kepala rumah tangga perempuan meliputi jenis, dan spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh kepala rumah tangga perempuan.

Setelah dibentuk kelompok-kelompok dengan diketuai salah satu kepala rumah tangga perempuan sasaran program dan didampingi langsung oleh satu pendamping desa, dilakukan pendalaman kebutuhan kepala rumah tangga dimana pendalaman kebutuhan ini disesuaikan dengan keinginan, berikut ini wawancara proses pengadaan barang kepala rumah tangga perempuan :

Kami pengadaan jenis barang usulan KRTP sesuai dengan daftar rincian usaha dan belanja KRTP yang telah di sepakati.<sup>132</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengadaan barang kepala rumah tangga perempuan sesuai dengan apa yang sudah di usulkan di form rincian kebutuhan kepala rumah tangga perempuan.

Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan dimana tahap pelaksanaan bisa dilaksanakan setelah bantuan dari pemerintah provinsi telah dicairkan kepada kepala rumah tangga perempuan. Pelaksanaan pencairan bantuan yang dilaksanakan oleh masing-masing desa

---

<sup>131</sup> Pendamping Desa Buntaran, Ibu Rifki, Wawancara (Rejotangan, 26 April 2019)

<sup>132</sup> Pendamping Desa Buntaran, Ibu Rifki, Wawancara (Rejotangan, 26 April 2019)

berbeda. Berikut wawancara peneliti dengan nara sumber yang berkaitan dengan hal tersebut:

Pencairannya dilaksanakan dalam satu tahap, jenis bantuan dalam bentuk barang kepada kepala rumah tangga senilai Rp 2.500.000 per kepala rumah tangga perempuan.<sup>133</sup>

Hasil wawancara diatas pencairan bantuan Jalin Matra PFK ini dalam satu termin, bantuan dari pemprov senilai 2.500.000 sepenuhnya diterimakan kepada KRTP sasaran yang didalamnya terdapat prosentase-prosentase pembagian yang ditentukan oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk kebutuhan modal usaha dan kebutuhan pokok.

Dalam realisasinya pembagian prosentase tersebut berbeda kebijakannya di setiap desa, hal tersebut tercermin dalam wawancara dibawah ini.

Dari bantuan sebesar 2.250.000 itu sepenuhnya untuk modal usaha, dan sisanya untuk kebutuhan pokok, seperti sembako.<sup>134</sup>

Setelah bantuan tersebut diterimakan kepada KRTP sasaran, dalam tahap pelaksanaannya KRTP akan mengimplementasikan ide atau gagasannya kedalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang perekonomian keluarganya, berikut hasil wawancara peneliti tentang pengimplementasian bantuan setelah dicairkan kepada KRTP.

Tahun 2018 bantuannya berupa barang, sesuai dengan usulan rincian usaha kepala rumah tangga perempuan.<sup>135</sup>

Bantuan sebesar 2.500.000 itu diberikan ke warga berupa barang, warga ditanya mau dibelanjakan apa saja uang itu. misalkan warga

---

<sup>133</sup> Kepala Desa Buntaran, Bapak Fauz Abadi, Wawancara (Rejotangan, 25 April 2019)

<sup>134</sup> Pendamping Desa Buntaran, Ibu Rifki, Wawancara (Rejotangan, 26 April 2019)

<sup>135</sup> Kepala Desa Buntaran, Bapak Fauz Abadi, Wawancara (Rejotangan, 25 April 2019)

pengen beli kambing, pengen belanja barang untuk dagangan, dia langsung dapat barang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa KRTP mempunyai peran penting terhadap pengimplementasian rencana usaha yang telah disepakati sebelumnya karena pembelanjaan untuk mendukung usaha yang akan dilaksanakan dilakukan oleh pendamping desa, kegiatan ini untuk mengembangkan kapasitas diri dalam pengembangan usaha yang akan dijalankannya.

Tahap selanjutnya yaitu evaluasi, tahap ini merupakan salah satu proses pengawasan yang dilakukan pendamping bersama dengan masyarakat terhadap program yang telah dilaksanakan, berikut wawancara peneliti terkait tahap ini dalam kegiatan evaluasi penanggulangan feminisasi kemiskinan yang telah dilaksanakan.

Waktu itu ada monitoring dari kabupaten, langsung ke KRTP sasaran, di Desa Buntaran ada 19 kepala rumah tangga yang mendapatkan bantuan, dari 19 orang tersebut hanya dipih 5 kepala rumah tangga yang di monitoring.<sup>136</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa monitoring yang dilaksanakan oleh pendamping kabupaten dilakukan secara acak atau sampling, dalam kegiatan monitoring tersebut dirasa belum maksimal atau kurangnya waktu perpanjangan waktu monitoring yang dilakukan untuk mendukung keberlanjutan program.

Tahap terakhir dalam pemberdayaan yaitu terminasi atau pemutusan hubungan secara formal antara pemberi dan penerima

---

<sup>136</sup> Pendamping Desa Buntaran, Ibu Rifki, Wawancara (Rejotangan, 26 April 2019)

dana, berikut wawancara peneliti terkait terminasi yang dilakukan dalam program ini.

**b. Peran Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan bagi Peningkatan Pendapatan Keluarga**

- Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Tenggur

Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dilaksanakan dengan mengintegrasikan kesadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan Kepala Rumah Tangga Perempuan sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, sesuai pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan serta kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan dari waktu ke waktu tentunya menentukan dampak yang akan dialami masyarakat khususnya Kepala Rumah Tangga Perempuan, karena hal tersebut merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemprov Jatim. Sehingga dari dampak yang terjadi akan menentukan meningkat atau tidaknya perekonomian rumah tangga sasaran yang dikepalai oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan.

Peran Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Dari hasil wawancara beberapa penerima program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan, menjelaskan bahwa ada peningkatan setelah menerima bantuan di Desa Tenggur, berikut pemaparannya :

Sebelum mendapatkan bantuan itu saya jualan perancangan di depan rumah dengan modal yang sedikit, setelah dapat bantuan program itu modal saya jadi tambah, setelah mendapatkan bantuan program ini saya bisa nabung sedikit-sedikit untuk kebutuhan sekolah cucu saya.<sup>137</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK) dengan penambahan modal usaha yang di berikan kepada kepala rumah tangga perempuan berupa barang sangat membantu perputaran modal usahanya yang telah berjalan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dari yang sebelumnya belum bisa menyisihkan penghasilannya untuk tabungan masa depan pendidikan cucunya setelah mendapat bantuan program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk masa depan cucunya.

Hasil wawancara tersebut linier dengan data observasi yang ditemukan peneliti di lapang yang menunjukkan bahwa barang-barang yang dijual KRTP sasaran tersebut tergolong lengkap, bisa dikatakan

---

<sup>137</sup> KRTP Desa Tenggur, Ibu Sunarti, Wawancara (Rejotangan, 27 Maret 2019)

seluruh kebutuhan sehari-hari tersedia di warung yang digunakan untuk berjualan KRTP tersebut.

Dampak lain yang bisa dirasakan lain oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan dari program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan ini adalah Kepemilikan terhadap sumberdaya atau aset, berikut hasil wawancara yang menggambarkan ada penambahan aset setelah Kepala Rumah Tangga Perempuan memperoleh bantuan program Penanggulangan feminisasi Kemiskinan.

Sebelum dapat bantuan program itu saya jualan di TPQ dekat rumah saya. dan saya belum punya toko, setelah dapat bantuan itu saya buat toko kecil ini, dan bisa nabung untuk sekolah anak saya satu-satunya.<sup>138</sup>

Hasil wawancara tersebut didukung oleh data observasi yang dilakukan peneliti dilapang bahwa KRTP tersebut merupakan KRTP yang sangat jujur dalam kesehariannya, terbukti beliau masih menyimpan bukti-bukti pembelanjaan bantuan program yang direalisasikan tahun lalu hingga sekarang, melihat kesungguhan beliau itu maka sangat wajar jika usaha yang dijalankan beliau masih berjalan dan dari usaha tersebut beliau mampu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk sekolah anaknya.

#### - Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Buntaran

Banyak Kepala Rumah Tangga Perempuan yang berhasil mengelola bantuan yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan tersebut,

---

<sup>138</sup> KRTP Desa Tengkur, Ibu Sulis, Wawancara (Rejotangan, 27 Maret 2019)

berikut hasil wawancara yang menggambarkan adanya penambahan modal setelah Kepala Rumah Tangga Perempuan memperoleh bantuan program Penanggulangan feminisasi Kemiskinan di Desa Buntaran :

Sebelum mendapatkan bantuan itu saya jualan bakso di depan rumah dengan modal yang sedikit, setelah dapat bantuan program itu modal saya jadi tambah, modal jualan bakso saya dari Program Jalin Matra sangat membantu, saya bisa menabung dari keuntungan jualan saya sehari hari”.<sup>139</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK) dengan penambahan modal usaha yang di berikan kepada kepala rumah tangga perempuan berupa modal usaha sangat membantu perputaran usahanya yang telah berjalan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga dari keuntungannya berjualan bisa disisihkan untuk menabung.

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran program peneliti Penanggualangan Feminisasi Kemiskinan ini ada beberapa ibu rumah tangga yang telah terbiasa mencari nafkah guna meningkatkan taraf pendapatan keluarga. Berikut ini wawancara peneliti dengan Ibu Sumiatun:

“Saya setiap harinya berjualan punten, berkat program jalin matra modal jualan punten saya bertambah sehingga keuntungan yang saya peroleh juga bertambah, dan kehidupan keluarga saya sekarang bisa disakatan sejahtera.”<sup>140</sup>

Dalam wawancara dengan peneliti sudah sangat cukup beralasan, secara rasional tentu saja jika setelah mendapat bantuan

---

<sup>139</sup> KRTP Desa Buntaran, Ibu Siti Salamah, Wawancara (Rejotangan, 28 April 2019)

<sup>140</sup> KRTP Desa Buntaran, Ibu Siti Sumiatun, Wawancara (Rejotangan, 28 April 2019)

program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan ini pendapatan bertambah bahkan akan berlipat, dibandingkan dengan sebelum mendapat bantuan tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa setelah mendapatkan bantuan dari program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan ada penambahan aset berupa tambahan barang yang sebelumnya belum dimiliki Kepala Rumah Tangga Perempuan tersebut, penambahan aset berupa barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung pertumbuhan perekonomian rumah tangga sasaran, dan apabila telah terjadi pertumbuhan perekonomian pada rumah tangga sasaran maka baik secara langsung maupun tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan pada rumah tangga sasaran tersebut, dimana hal itu telah dipaparkan dalam data observasi peneliti diatas.

## **B. Temuan Penelitian**

Temuan penelitian ini disusun berdasarkan hasil deskripsi data yang ditemukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan di Desa Tengkur dan Desa Buntaran . Berikut temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus masalah yang diangkat dalam tesis ini.

### **1. Peran Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan Perempuan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan

harkat dan martabat serta tanggung jawab mereka dalam bermasyarakat maupun bernegara.

Temuan penelitian terkait pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di Desa Tenggur dan Desa Buntaran yaitu terdapatnya indikator keberhasilan program yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program tersebut, indikator tersebut adalah tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan.

Tepat sasaran adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sesuai dengan Basis Data Terpadu, rumah tangga sasaran dilakukan verifikasi untuk mengetahui kondisi saat ini sekaligus melakukan validasi apakah RTS yang dimaksud masih layak atau tidak untuk memperoleh bantuan, apabila RTS sudah tidak layak maka akan dilakukan pergantian RTS melalui mekanisme rembuk warga dengan tidak menambah alokasi RTS masing-masing desa.

Tepat jumlah adalah bantuan yang diberikan kepada RTS berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 yang diterimakan secara langsung dalam bentuk barang modal, pembelanjaan barang modal tersebut dilakukan oleh RTS dengan difasilitasi oleh pendamping desa.

Tepat pemanfaatan adalah realisasi pembelanjaan barang untuk usaha dilakukan oleh RTS sendiri dengan didampingi oleh pendamping desa sehingga diharapkan RTS mendapatkan barang kebutuhan sesuai dengan rencana usaha RTS. Untuk memenuhi indikator keberhasilan pelaksanaan program tersebut dilakukanlah tahap-tahap kegiatan yang

dilakukan stakeholder-stakeholder pemerintah provinsi Jawa Timur diantaranya adalah diadakannya sosialisai di tingkat Provinsi hingga tingkat desa, di tingkat desa diadakan kegiatan pra rembug warga dan rembug warga untuk mensosialisasikan program dan memverifikasi penerima bantuan apakah masih layak menerima bantuan tersebut atau tidak, baru setelah kegiatankegiatan tersebut dilaksanakan dibentuklah kelompok-kelompok masyarakat yang didampingi tenaga pendamping desa untuk melakukan pendalaman kebutuhan Kepala Rumah Tangga Sasaran yang kemudian akan di proses untuk diajukan ke pemerintah provinsi untuk direalisasikan untuk pemenuhan kebutuhan usaha yang diinginkan atau dikehendaki oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan.

Berikut hasil temuan penelitian terkait hal tersebut yang dikorelasikan dengan pelaksanaan program PFK di lapang:

Tabel 4.1 Hasil Temuan Penelitian Terkait Tahap Pelaksanaan Program

No	Tahapan Pelaksanaan Program	Temuan
1	Sosialisasi Kecamatan hingga Desa	- Komunikasi yang kurang proaktif antara pendamping kecamatan sehingga tidak menimbulkan sedikit ketimpangan informasi di salah satu pihak.
2	Verifikasi data	- Peran serta Kepala Desa dengan perangkatnya dalam kegiatan survey awal. Ditemukan tidak terjadi banyak pergeseran data kemiskinan dari BPS tahun 2011-2018 untuk KRTP.
3	Pembentukan POKMAS	- Pendamping desa kesulitan mencari pengurus Pokmas dikarenakan mayoritas anggota Pokmas identik tua.
4	Pendalaman Kebutuhan Pokmas	- Pendalaman usaha disesuaikan dengan keahlian atau kemampuan KRTP, Kebutuhan dan Keinginan KRTP yang bersangkutan.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diadakannya fasilitasi pelatihan jika banyak KRTP yang berminat.</li> <li>- Perbedaan harapan pemerintah atas pelaksanaan program dengan keadaan dilapang.</li> </ul>
5	Pelaksanaan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan pencairan dana dari desa ke KRTP sasaran antara desa satu dan desa lainnya.</li> <li>-Perbedaan-pembagian peruntukan dana bantuan tergantung kebijakan masing-masing desa yang disesuaikan dengan kebutuhan KRTP masingmasing desa</li> </ul>
6	Evaluasi pertanggungjawaban	-Jarak pelaksanaan monitoring perkembangan usaha yang kurang panjang
7	Keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Keberlanjutan pemantauan pendamping desa meskipun sudah dilakukan pemutusan hubungan secara resmi dari pusat.</li> <li>- Fasilitasi pemasaran produk</li> </ul>

(Sumber: Data diolah)

Selain ditemukan indikator keberhasilan program yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program tersebut, ditemukan juga pembentukan jejaring yang digagas oleh pendamping kabupaten untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, jejaring yang dibentuk oleh pendamping kabupaten tersebut diberi nama motherchare jatim atau jarik lurik. Dalam jejaring itu pendamping kabupaten membantu mempromosikan dan memasarkan produk-produk Kepala Rumah Tangga Perempuan yang dirasa layak untuk dipasarkan. Lewat jejaring tersebut pendamping kabupaten juga membantu menghubungkan Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan Dinas-dinas Sosial untuk pemenuhan kebutuhan yang lainnya seperti pendidikan untuk putra-putrinya.

## **2. Peran Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan bagi Peningkatan Pendapatan Keluarga**

Aktifitas yang dilahirkan dari Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan terhadap peningkatan ekonomi dari waktu ke waktu tentunya menentukan dampak yang akan dialami oleh masyarakat khususnya Rumah Tangga Sasaran (RTS) program, sehingga dari dampak yang terjadi akan menentukan meningkat atau tidaknya perekonomian Rumah Tangga Sasaran tersebut. Salah satu dampak yang diharapkan dalam kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan adalah terciptanya kemandirian RTS khususnya Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam perekonomiannya.

Kemandirian menjadi salah satu dampak yang akan dirasakan oleh Rumah Tangga Sasaran atas kegiatan yang dilakukannya melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, mandiri merupakan perilaku yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas dengan benar dan bermanfaat atas dorongan dan kemampuannya bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Dalam proses peningkatan pendapatan keluarga yang dilakukan pemerintah melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan ini terdapat kriteria keberhasilannya untuk pengelolaan bantuan yang diberikan kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan, kriteria tersebut adalah berjalan atau berkembang, stagnan dan gagal.

Dikatakan berjalan atau berkembang apabila setelah mendapatkan bantuan tersebut Kepala Rumah Tangga Perempuan mampu

mempertahankan atau bahkan mengembangkan usaha yang ditekuninya dan usaha usaha tersebut mampu menopang kebutuhan sehari-hari Kepala Rumah Tangga Perempuan beserta keluarganya, sedangkan dikatakan stagnan apabila usaha yang dijalankan oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan berjalan tapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga masih dibutuhkan usaha yang lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dikatakan gagal apabila usaha yang dilakukan Kepala Rumah Tangga Perempuan tersebut sudah tidak berjalan sama sekali dan bahkan modal yang diberikan berupa barang modal lewat program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan sudah habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari Kepala Rumah Tangga Perempuan tersebut sampai tidak ada yang tersisa.

Tabel 4.3. Hasil Temuan Penelitian Terkait Peran Program PFK

No	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Usaha	Temuan
1.	Berjalan atau berkembang	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kelangsungan dan bertambahnya kapasitas bisnis</li> <li>-Tambahkan Penghasilan</li> <li>-Menabung</li> <li>-Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dari kegiatan usaha yang dijalankan</li> <li>- Sumber pendapatan tetap</li> <li>- Kepemilikan</li> <li>- Zakat – Infak</li> </ul>
2.	Stagnan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kelangsungan bisnis</li> <li>-Bertambahnya kapasitas bisnis</li> <li>-Tambahan penghasilan</li> <li>- Kepemilikan</li> <li>- Zakat</li> </ul>
3.	Gagal	- Terjualnya seluruh aset permodalan

(Sumber: Data diolah)